



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 187/PMK.07/2018
TENTANG
TATA CARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (22) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN

Pasal 2

- (1) DAU tambahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).

- (2) DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan.
- (3) DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi komitmen pendanaan Daerah kabupaten/kota kepada kelurahan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

- (1) Rincian DAU tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menurut Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
- (2) DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi bagian dalam perhitungan pengenaan sanksi penundaan penyaluran dan/atau pemotongan DAU.

Pasal 4

- (1) Alokasi DAU tambahan setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan berdasarkan jumlah kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dikalikan dengan besaran DAU tambahan per kelurahan sesuai dengan kategori Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

- (2) Jumlah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah kelurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
- (3) Kategori Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penilaian dalam rangka penghitungan Dana Insentif Daerah pada kategori pelayanan dasar publik yang mengelompokkan Daerah kabupaten/kota menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:
 - a. baik;
 - b. perlu ditingkatkan; dan
 - c. sangat perlu ditingkatkan.
- (4) Daerah kabupaten/kota dengan kategori baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, DAU tambahan per kelurahan sebesar Rp352.941.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (5) Daerah kabupaten/kota dengan kategori perlu ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, DAU tambahan per kelurahan sebesar Rp370.138.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Daerah kabupaten/kota dengan kategori sangat perlu ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, DAU tambahan per kelurahan sebesar Rp384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan DAU tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

N

}-

- (2) DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melengkapi anggaran kelurahan dalam pendanaan kelurahan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- (3) DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi secara merata kepada seluruh kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk masing-masing kelurahan dianggarkan dalam akun sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (5) Dalam hal DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019, bupati/wali kota menganggarkan DAU tambahan dalam perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

DAU tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak diperhitungkan sebagai anggaran wajib Pemerintah Daerah.

BAB III

PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran DAU tambahan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pemindahbukuan DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun DAU dengan *output* kegiatan penyaluran DAU tambahan.

- (3) Penyaluran DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Mei Tahun Anggaran 2019; dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus Tahun Anggaran 2019.
- (4) Penyaluran DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi.

Pasal 8

- (1) Penyaluran DAU tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan setelah bupati/wali kota menyampaikan dokumen persyaratan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Kepala Daerah mengenai Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 yang memuat penganggaran DAU tambahan; dan
 2. surat pernyataan telah mengalokasikan anggaran untuk pendanaan kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dan/atau Peraturan Kepala Daerah mengenai Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019; dan
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan DAU tambahan tahap I yang menunjukkan realisasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari DAU tambahan yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 9

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat minggu kedua bulan Mei 2019; dan
 - b. tahap II paling lambat tanggal 16 Agustus 2019.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DAU tambahan tahap I dan/atau tahap II tidak disalurkan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan DAU tambahan Tahun Anggaran 2019 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret 2020.

Pasal 10

Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2019 terdapat sisa DAU tambahan, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sisa DAU tambahan atas kegiatan yang *output* kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada kelurahan tertentu sesuai prioritas; dan
- b. sisa DAU tambahan atas kegiatan yang *output* kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada kelurahan bersangkutan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dalam hal ketentuan mengenai penyaluran DAU tambahan tidak diatur khusus dalam Peraturan Menteri ini, penyaluran DAU tambahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pasal 12

Ketentuan mengenai:

- a. rincian Daerah kabupaten/kota dengan masing-masing kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - b. format surat pernyataan dan format laporan realisasi penyerapan DAU tambahan tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
 - c. format laporan realisasi penyerapan DAU tambahan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3;
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

H

J

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018



DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1832

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 19710912 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 187/PMK.07/2018
TENTANG
TATA CARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM
TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

A. RINCIAN DAERAH DENGAN MASING-MASING KATEGORI PENILAIAN
PELAYANAN DASAR PUBLIK DALAM PERHITUNGAN ALOKASI DAU
TAMBAHAN

NO.	DAERAH	KATEGORI	JUMLAH KELURAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	KAB. ASAHAN	PERLU DITINGKATKAN	27
2	KAB. DAIRI	PERLU DITINGKATKAN	8
3	KAB. DELI SERDANG	PERLU DITINGKATKAN	14
4	KAB. KARO	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	10
5	KAB. LABUHANBATU	PERLU DITINGKATKAN	23
6	KAB. LANGKAT	PERLU DITINGKATKAN	37
7	KAB. MANDAILING NATAL	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	27
8	KAB. SIMALUNGUN	PERLU DITINGKATKAN	27
9	KAB. TAPANULI SELATAN	PERLU DITINGKATKAN	37
10	KAB. TAPANULI TENGAH	PERLU DITINGKATKAN	56
11	KAB. TAPANULI UTARA	PERLU DITINGKATKAN	11
12	KAB. TOBA SAMOSIR	PERLU DITINGKATKAN	13
13	KOTA BINJAI	PERLU DITINGKATKAN	37
14	KOTA MEDAN	BAIK	151
15	KOTA PEMATANG SIANTAR	BAIK	53
16	KOTA SIBOLGA	PERLU DITINGKATKAN	17
17	KOTA TANJUNG BALAI	PERLU DITINGKATKAN	31
18	KOTA TEBING TINGGI	PERLU DITINGKATKAN	35
19	KOTA PADANG SIDEMPUAN	PERLU DITINGKATKAN	37

NO.	DAERAH	KATEGORI	JUMLAH KELURAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
20	KAB. NIAS SELATAN	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	2
21	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	PERLU DITINGKATKAN	1
22	KAB. SERDANG BEDAGAI	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	6
23	KAB. SAMOSIR	PERLU DITINGKATKAN	6
24	KAB. BATU BARA	PERLU DITINGKATKAN	10
25	KAB. PADANG LAWAS	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	1
26	KAB. PADANG LAWAS UTARA	PERLU DITINGKATKAN	2
27	KAB. LABUHANBATU SELATAN	PERLU DITINGKATKAN	2
28	KAB. LABUHANBATU UTARA	PERLU DITINGKATKAN	8
29	KAB. NIAS UTARA	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	1
30	KOTA GUNUNGSITOLI	PERLU DITINGKATKAN	3
31	KOTA BUKIT TINGGI	BAIK	24
32	KOTA PADANG PANJANG	BAIK	16
33	KOTA PADANG	PERLU DITINGKATKAN	104
34	KOTA PAYAKUMBUH	PERLU DITINGKATKAN	47
35	KOTA SAWAHLUNTO	BAIK	10
36	KOTA SOLOK	PERLU DITINGKATKAN	13
37	KOTA PARIAMAN	PERLU DITINGKATKAN	16
38	KAB. BENGKALIS	PERLU DITINGKATKAN	19
39	KAB. INDRAGIRI HILIR	PERLU DITINGKATKAN	39
40	KAB. INDRAGIRI HULU	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	16
41	KAB. KAMPAR	PERLU DITINGKATKAN	8
42	KAB. KUANTAN SINGINGI	PERLU DITINGKATKAN	11
43	KAB. PELALAWAN	PERLU DITINGKATKAN	14
44	KAB. ROKAN HILIR	PERLU DITINGKATKAN	25

NO.	DAERAH	KATEGORI	JUMLAH KELURAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
45	KAB. ROKAN HULU	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	6
46	KAB. SIAK	PERLU DITINGKATKAN	9
47	KOTA DUMAI	PERLU DITINGKATKAN	33
48	KOTA PEKANBARU	PERLU DITINGKATKAN	83
49	KAB. KEPULAUAN MERANTI	PERLU DITINGKATKAN	5
50	KAB. BATANG HARI	PERLU DITINGKATKAN	14
51	KAB. BUNGO	PERLU DITINGKATKAN	12
52	KAB. KERINCI	PERLU DITINGKATKAN	2
53	KAB. MERANGIN	PERLU DITINGKATKAN	10
54	KAB. MUARO JAMBI	PERLU DITINGKATKAN	5
55	KAB. SAROLANGUN	PERLU DITINGKATKAN	9
56	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	PERLU DITINGKATKAN	20
57	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	PERLU DITINGKATKAN	20
58	KAB. TEBO	PERLU DITINGKATKAN	5
59	KOTA JAMBI	PERLU DITINGKATKAN	62
60	KOTA SUNGAI PENUH	BAIK	4
61	KAB. LAHAT	PERLU DITINGKATKAN	18
62	KAB. MUSI BANYUASIN	PERLU DITINGKATKAN	13
63	KAB. MUSI RAWAS	PERLU DITINGKATKAN	13
64	KAB. MUARA ENIM	PERLU DITINGKATKAN	10
65	KAB. OGAN KOMERING ILIR	BAIK	13
66	KAB. OGAN KOMERING ULU	PERLU DITINGKATKAN	14
67	KOTA PALEMBANG	BAIK	107
68	KOTA PRABUMULIH	BAIK	25
69	KOTA PAGAR ALAM	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	35

9

NO.	DAERAH	KATEGORI	JUMLAH KELURAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
70	KOTA LUBUK LINGGAU	PERLU DITINGKATKAN	72
71	KAB. BANYUASIN	PERLU DITINGKATKAN	16
72	KAB. OGAN ILIR	PERLU DITINGKATKAN	14
73	KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR	PERLU DITINGKATKAN	7
74	KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN	PERLU DITINGKATKAN	7
75	KAB. EMPAT LAWANG	PERLU DITINGKATKAN	9
76	KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	PERLU DITINGKATKAN	6
77	KAB. MUSI RAWAS UTARA	PERLU DITINGKATKAN	7
78	KAB. BENGKULU SELATAN	PERLU DITINGKATKAN	16
79	KAB. BENGKULU UTARA	PERLU DITINGKATKAN	5
80	KAB. REJANG LEBONG	BAIK	34
81	KOTA BENGKULU	BAIK	67
82	KAB. KAUR	PERLU DITINGKATKAN	3
83	KAB. SELUMA	PERLU DITINGKATKAN	20
84	KAB. MUKOMUKO	PERLU DITINGKATKAN	3
85	KAB. LEBONG	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	11
86	KAB. KEPAHANG	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	12
87	KAB. BENGKULU TENGAH	PERLU DITINGKATKAN	1
88	KAB. LAMPUNG BARAT	PERLU DITINGKATKAN	5
89	KAB. LAMPUNG SELATAN	PERLU DITINGKATKAN	4
90	KAB. LAMPUNG TENGAH	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	10
91	KAB. LAMPUNG UTARA	PERLU DITINGKATKAN	15
92	KAB. TANGGAMUS	PERLU DITINGKATKAN	3
93	KAB. TULANG BAWANG	PERLU DITINGKATKAN	4
94	KAB. WAY KANAN	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	6

9

NO.	DAERAH	KATEGORI	JUMLAH KELURAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
95	KOTA BANDAR LAMPUNG	PERLU DITINGKATKAN	126
96	KOTA METRO	BAIK	22
97	KAB. PRINGSEWU	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	5
98	KAB. TULANG BAWANG BARAT	PERLU DITINGKATKAN	3
99	KAB. PESISIR BARAT	PERLU DITINGKATKAN	2
100	KAB. BANDUNG	PERLU DITINGKATKAN	10
101	KAB. BEKASI	PERLU DITINGKATKAN	7
102	KAB. BOGOR	PERLU DITINGKATKAN	19
103	KAB. CIAMIS	PERLU DITINGKATKAN	7
104	KAB. CIANJUR	PERLU DITINGKATKAN	6
105	KAB. CIREBON	PERLU DITINGKATKAN	12
106	KAB. GARUT	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	21
107	KAB. INDRAMAYU	PERLU DITINGKATKAN	8
108	KAB. KARAWANG	BAIK	12
109	KAB. KUNINGAN	PERLU DITINGKATKAN	15
110	KAB. MAJALENGKA	PERLU DITINGKATKAN	13
111	KAB. PURWAKARTA	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	9
112	KAB. SUBANG	PERLU DITINGKATKAN	8
113	KAB. SUKABUMI	PERLU DITINGKATKAN	5
114	KAB. SUMEDANG	BAIK	7
115	KOTA BANDUNG	BAIK	151
116	KOTA BEKASI	BAIK	56
117	KOTA BOGOR	PERLU DITINGKATKAN	68
118	KOTA CIREBON	BAIK	22
119	KOTA DEPOK	PERLU DITINGKATKAN	63

9

NO.	DAERAH	KATEGORI	JUMLAH KELURAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
120	KOTA SUKABUMI	BAIK	33
121	KOTA TASIKMALAYA	PERLU DITINGKATKAN	69
122	KOTA CIMAH	PERLU DITINGKATKAN	15
123	KOTA BANJAR	BAIK	9
124	KAB. BANJARNEGARA	PERLU DITINGKATKAN	12
125	KAB. BANYUMAS	BAIK	30
126	KAB. BATANG	PERLU DITINGKATKAN	9
127	KAB. BLORA	PERLU DITINGKATKAN	24
128	KAB. BOYOLALI	BAIK	6
129	KAB. BREBES	PERLU DITINGKATKAN	5
130	KAB. CILACAP	BAIK	15
131	KAB. DEMAK	BAIK	6
132	KAB. GROBOGAN	BAIK	7
133	KAB. JEPARA	PERLU DITINGKATKAN	11
134	KAB. KARANGANYAR	PERLU DITINGKATKAN	15
135	KAB. KEBUMEN	PERLU DITINGKATKAN	11
136	KAB. KENDAL	PERLU DITINGKATKAN	20
137	KAB. KLATEN	BAIK	10
138	KAB. KUDUS	BAIK	9
139	KAB. MAGELANG	PERLU DITINGKATKAN	5
140	KAB. PATI	PERLU DITINGKATKAN	5
141	KAB. PEKALONGAN	BAIK	13
142	KAB. PEMALANG	PERLU DITINGKATKAN	11
143	KAB. PURBALINGGA	BAIK	15
144	KAB. PURWOREJO	BAIK	25

NO.	DAERAH	KATEGORI	JUMLAH KELURAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
145	KAB. REMBANG	PERLU DITINGKATKAN	7
146	KAB. SEMARANG	BAIK	27
147	KAB. SRAGEN	BAIK	12
148	KAB. SUKOHARJO	PERLU DITINGKATKAN	17
149	KAB. TEGAL	BAIK	6
150	KAB. TEMANGGUNG	PERLU DITINGKATKAN	23
151	KAB. WONOGIRI	BAIK	43
152	KAB. WONOSOBO	PERLU DITINGKATKAN	29
153	KOTA MAGELANG	BAIK	17
154	KOTA PEKALONGAN	BAIK	27
155	KOTA SALATIGA	BAIK	23
156	KOTA SEMARANG	BAIK	177
157	KOTA SURAKARTA	PERLU DITINGKATKAN	51
158	KOTA TEGAL	BAIK	27
159	KAB. KULON PROGO	BAIK	1
160	KOTA YOGYAKARTA	BAIK	45
161	KAB. BANGKALAN	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	8
162	KAB. BANYUWANGI	PERLU DITINGKATKAN	28
163	KAB. BLITAR	PERLU DITINGKATKAN	28
164	KAB. BOJONEGORO	BAIK	11
165	KAB. BONDOWOSO	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	10
166	KAB. GRESIK	PERLU DITINGKATKAN	26
167	KAB. JEMBER	PERLU DITINGKATKAN	22
168	KAB. JOMBANG	BAIK	4
169	KAB. KEDIRI	BAIK	1

NO.	DAERAH	KATEGORI	JUMLAH KELURAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
170	KAB. LAMONGAN	PERLU DITINGKATKAN	12
171	KAB. LUMAJANG	PERLU DITINGKATKAN	7
172	KAB. MADIUN	BAIK	8
173	KAB. MAGETAN	BAIK	28
174	KAB. MALANG	PERLU DITINGKATKAN	12
175	KAB. MOJOKERTO	PERLU DITINGKATKAN	5
176	KAB. NGANJUK	BAIK	20
177	KAB. NGAWI	BAIK	4
178	KAB. PACITAN	PERLU DITINGKATKAN	5
179	KAB. PAMEKASAN	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	11
180	KAB. PASURUAN	PERLU DITINGKATKAN	24
181	KAB. PONOROGO	PERLU DITINGKATKAN	26
182	KAB. PROBOLINGGO	PERLU DITINGKATKAN	5
183	KAB. SAMPANG	PERLU DITINGKATKAN	6
184	KAB. SIDOARJO	BAIK	31
185	KAB. SITUBONDO	PERLU DITINGKATKAN	4
186	KAB. SUMENEP	PERLU DITINGKATKAN	4
187	KAB. TRENGGALEK	PERLU DITINGKATKAN	5
188	KAB. TUBAN	BAIK	17
189	KAB. TULUNGAGUNG	BAIK	14
190	KOTA BLITAR	BAIK	21
191	KOTA KEDIRI	BAIK	46
192	KOTA MADIUN	BAIK	27
193	KOTA MALANG	BAIK	57
194	KOTA MOJOKERTO	BAIK	18

NO.	DAERAH	KATEGORI	JUMLAH KELURAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
195	KOTA PASURUAN	BAIK	34
196	KOTA PROBOLINGGO	BAIK	29
197	KOTA SURABAYA	BAIK	154
198	KOTA BATU	PERLU DITINGKATKAN	5
199	KAB. BENGKAYANG	PERLU DITINGKATKAN	2
200	KAB. KAPUAS HULU	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	4
201	KAB. KETAPANG	PERLU DITINGKATKAN	9
202	KAB. MEMPAWAH	PERLU DITINGKATKAN	7
203	KAB. SANGGAU	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	6
204	KAB. SINTANG	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	16
205	KOTA PONTIANAK	PERLU DITINGKATKAN	29
206	KOTA SINGKAWANG	PERLU DITINGKATKAN	26
207	KAB. BARITO SELATAN	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	7
208	KAB. BARITO UTARA	PERLU DITINGKATKAN	10
209	KAB. KAPUAS	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	17
210	KAB. KOTAWARINGIN BARAT	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	13
211	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	17
212	KOTA PALANGKARAYA	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	30
213	KAB. KATINGAN	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	7
214	KAB. SERUYAN	PERLU DITINGKATKAN	3
215	KAB. SUKAMARA	PERLU DITINGKATKAN	3
216	KAB. LAMANDAU	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	3
217	KAB. GUNUNG MAS	PERLU DITINGKATKAN	13
218	KAB. PULANG PISAU	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	4
219	KAB. MURUNG RAYA	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	9

NO.	DAERAH	KATEGORI	JUMLAH KELURAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
220	KAB. BARITO TIMUR	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	3
221	KAB. BANJAR	PERLU DITINGKATKAN	13
222	KAB. BARITO KUALA	PERLU DITINGKATKAN	6
223	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	4
224	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	8
225	KAB. HULU SUNGAI UTARA	PERLU DITINGKATKAN	5
226	KAB. KOTABARU	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	4
227	KAB. TABALONG	PERLU DITINGKATKAN	10
228	KAB. TANAH LAUT	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	5
229	KAB. TAPIN	PERLU DITINGKATKAN	9
230	KOTA BANJARBARU	PERLU DITINGKATKAN	20
231	KOTA BANJARMASIN	PERLU DITINGKATKAN	52
232	KAB. BALANGAN	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	3
233	KAB. TANAH BUMBU	PERLU DITINGKATKAN	5
234	KAB. BERAU	PERLU DITINGKATKAN	10
235	KAB. KUTAI KARTANEGARA	PERLU DITINGKATKAN	44
236	KAB. KUTAI BARAT	PERLU DITINGKATKAN	4
237	KAB. KUTAI TIMUR	PERLU DITINGKATKAN	2
238	KAB. PASER	PERLU DITINGKATKAN	5
239	KOTA BALIKPAPAN	BAIK	34
240	KOTA BONTANG	BAIK	15
241	KOTA SAMARINDA	BAIK	59
242	KAB. PENAJAM PASER UTARA	PERLU DITINGKATKAN	24
243	KAB. BOLAANG MONGONDOW	PERLU DITINGKATKAN	2
244	KAB. MINAHASA	PERLU DITINGKATKAN	43

NO.	DAERAH	KATEGORI	JUMLAH KELURAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
245	KAB. KEPULAUAN SANGIHE	PERLU DITINGKATKAN	22
246	KOTA BITUNG	PERLU DITINGKATKAN	69
247	KOTA MANADO	PERLU DITINGKATKAN	87
248	KAB. KEPULAUAN TALAUD	PERLU DITINGKATKAN	11
249	KAB. MINAHASA SELATAN	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	10
250	KOTA TOMOHON	BAIK	44
251	KAB. MINAHASA UTARA	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	6
252	KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	PERLU DITINGKATKAN	10
253	KOTA KOTAMOBAGU	PERLU DITINGKATKAN	18
254	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	PERLU DITINGKATKAN	1
255	KAB. MINAHASA TENGGARA	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	9
256	KAB. BANGGAI	PERLU DITINGKATKAN	46
257	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	PERLU DITINGKATKAN	3
258	KAB. BUOL	PERLU DITINGKATKAN	7
259	KAB. TOLI-TOLI	PERLU DITINGKATKAN	6
260	KAB. DONGGALA	PERLU DITINGKATKAN	9
261	KAB. MOROWALI	PERLU DITINGKATKAN	7
262	KAB. POSO	PERLU DITINGKATKAN	28
263	KOTA PALU	BAIK	46
264	KAB. PARIGI MOUTONG	PERLU DITINGKATKAN	5
265	KAB. TOJO UNA UNA	PERLU DITINGKATKAN	12
266	KAB. BANGGAI LAUT	BAIK	3
267	KAB. MOROWALI UTARA	PERLU DITINGKATKAN	3
268	KAB. BANTAENG	PERLU DITINGKATKAN	21
269	KAB. BARRU	BAIK	15

NO.	DAERAH	KATEGORI	JUMLAH KELURAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
270	KAB. BONE	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	44
271	KAB. BULUKUMBA	PERLU DITINGKATKAN	27
272	KAB. ENREKANG	PERLU DITINGKATKAN	17
273	KAB. GOWA	PERLU DITINGKATKAN	46
274	KAB. JENEPONTO	PERLU DITINGKATKAN	31
275	KAB. LUWU	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	20
276	KAB. LUWU UTARA	BAIK	7
277	KAB. MAROS	PERLU DITINGKATKAN	23
278	KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	PERLU DITINGKATKAN	38
279	KOTA PALOPO	BAIK	48
280	KAB. LUWU TIMUR	PERLU DITINGKATKAN	3
281	KAB. PINRANG	PERLU DITINGKATKAN	39
282	KAB. SINJAI	PERLU DITINGKATKAN	13
283	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	PERLU DITINGKATKAN	7
284	KAB. SIDENRENG RAPPANG	PERLU DITINGKATKAN	38
285	KAB. SOPPENG	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	21
286	KAB. TAKALAR	BAIK	24
287	KAB. TANA TORAJA	PERLU DITINGKATKAN	47
288	KAB. WAJO	PERLU DITINGKATKAN	48
289	KOTA PARE-PARE	PERLU DITINGKATKAN	22
290	KOTA MAKASSAR	BAIK	153
291	KAB. TORAJA UTARA	BAIK	40
292	KAB. BUTON	PERLU DITINGKATKAN	12
293	KAB. KONAWE	PERLU DITINGKATKAN	57
294	KAB. KOLAKA	PERLU DITINGKATKAN	35

NO.	DAERAH	KATEGORI	JUMLAH KELURAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
295	KAB. MUNA	PERLU DITINGKATKAN	26
296	KOTA KENDARI	PERLU DITINGKATKAN	64
297	KOTA BAU-BAU	PERLU DITINGKATKAN	43
298	KAB. KONAWE SELATAN	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	15
299	KAB. BOMBANA	BAIK	22
300	KAB. WAKATOBI	PERLU DITINGKATKAN	26
301	KAB. KOLAKA UTARA	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	6
302	KAB. KONAWE UTARA	PERLU DITINGKATKAN	11
303	KAB. BUTON UTARA	PERLU DITINGKATKAN	12
304	KAB. KONAWE KEPULAUAN	PERLU DITINGKATKAN	7
305	KAB. KOLAKA TIMUR	PERLU DITINGKATKAN	16
306	KAB. MUNA BARAT	PERLU DITINGKATKAN	5
307	KAB. BUTON TENGAH	PERLU DITINGKATKAN	10
308	KAB. BUTON SELATAN	BAIK	10
309	KAB. BADUNG	BAIK	16
310	KAB. BANGLI	PERLU DITINGKATKAN	4
311	KAB. BULELENG	BAIK	19
312	KAB. GIANYAR	BAIK	6
313	KAB. JEMBRANA	PERLU DITINGKATKAN	10
314	KAB. KARANGASEM	BAIK	3
315	KAB. KLUNGKUNG	BAIK	6
316	KOTA DENPASAR	BAIK	16
317	KAB. DOMPU	PERLU DITINGKATKAN	9
318	KAB. LOMBOK BARAT	PERLU DITINGKATKAN	3
319	KAB. LOMBOK TENGAH	PERLU DITINGKATKAN	12

NO.	DAERAH	KATEGORI	JUMLAH KELURAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
320	KAB. LOMBOK TIMUR	PERLU DITINGKATKAN	15
321	KAB. SUMBAWA	PERLU DITINGKATKAN	8
322	KOTA MATARAM	PERLU DITINGKATKAN	50
323	KOTA BIMA	PERLU DITINGKATKAN	38
324	KAB. SUMBAWA BARAT	PERLU DITINGKATKAN	7
325	KAB. ALOR	PERLU DITINGKATKAN	17
326	KAB. BELU	PERLU DITINGKATKAN	12
327	KAB. ENDE	PERLU DITINGKATKAN	23
328	KAB. FLORES TIMUR	PERLU DITINGKATKAN	21
329	KAB. KUPANG	PERLU DITINGKATKAN	17
330	KAB. LEMBATA	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	7
331	KAB. MANGGARAI	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	26
332	KAB. NGADA	PERLU DITINGKATKAN	16
333	KAB. SIKKA	PERLU DITINGKATKAN	13
334	KAB. SUMBA BARAT	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	11
335	KAB. SUMBA TIMUR	PERLU DITINGKATKAN	16
336	KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	PERLU DITINGKATKAN	12
337	KAB. TIMOR TENGAH UTARA	PERLU DITINGKATKAN	33
338	KOTA KUPANG	PERLU DITINGKATKAN	51
339	KAB. ROTE NDAO	PERLU DITINGKATKAN	7
340	KAB. MANGGARAI BARAT	BAIK	5
341	KAB. NAGEKEO	PERLU DITINGKATKAN	16
342	KAB. SUMBA BARAT DAYA	PERLU DITINGKATKAN	2
343	KAB. MANGGARAI TIMUR	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	17
344	KAB. SABU RAIJUA	PERLU DITINGKATKAN	5

NO.	DAERAH	KATEGORI	JUMLAH KELURAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
345	KAB. MALUKU TENGGARA BARAT	PERLU DITINGKATKAN	2
346	KAB. MALUKU TENGAH	PERLU DITINGKATKAN	6
347	KAB. MALUKU TENGGARA	PERLU DITINGKATKAN	1
348	KOTA AMBON	BAIK	20
349	KAB. KEPULAUAN ARU	PERLU DITINGKATKAN	2
350	KOTA TUAL	PERLU DITINGKATKAN	3
351	KAB. MALUKU BARAT DAYA	PERLU DITINGKATKAN	1
352	KAB. BIAK NUMFOR	PERLU DITINGKATKAN	14
353	KAB. JAYAPURA	PERLU DITINGKATKAN	5
354	KAB. JAYAWIJAYA	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	4
355	KAB. MERAUKE	PERLU DITINGKATKAN	11
356	KAB. MIMIKA	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	19
357	KAB. NABIRE	PERLU DITINGKATKAN	9
358	KAB. PANIAI	PERLU DITINGKATKAN	5
359	KAB. PUNCAK JAYA	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	3
360	KAB. KEPULAUAN YAPEN	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	5
361	KOTA JAYAPURA	BAIK	25
362	KAB. SARMI	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	2
363	KAB. YAHUKIMO	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	1
364	KAB. TOLIKARA	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	4
365	KAB. MAPPI	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	2
366	KAB. LANNY JAYA	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	1
367	KOTA TERNATE	BAIK	77
368	KOTA TIDORE KEPULAUAN	BAIK	40
369	KAB. LEBAK	PERLU DITINGKATKAN	5

NO.	DAERAH	KATEGORI	JUMLAH KELURAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
370	KAB. PANDEGLANG	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	13
371	KAB. TANGERANG	PERLU DITINGKATKAN	28
372	KOTA CILEGON	BAIK	43
373	KOTA TANGERANG	PERLU DITINGKATKAN	104
374	KOTA SERANG	PERLU DITINGKATKAN	66
375	KOTA TANGERANG SELATAN	PERLU DITINGKATKAN	54
376	KAB. BANGKA	BAIK	19
377	KAB. BELITUNG	PERLU DITINGKATKAN	7
378	KOTA PANGKAL PINANG	PERLU DITINGKATKAN	42
379	KAB. BANGKA SELATAN	PERLU DITINGKATKAN	3
380	KAB. BANGKA TENGAH	PERLU DITINGKATKAN	7
381	KAB. BANGKA BARAT	BAIK	4
382	KAB. GORONTALO	PERLU DITINGKATKAN	14
383	KOTA GORONTALO	PERLU DITINGKATKAN	50
384	KAB. POHUWATO	BAIK	3
385	KAB. BONE BOLANGO	BAIK	5
386	KAB. NATUNA	PERLU DITINGKATKAN	6
387	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	2
388	KAB. KARIMUN	PERLU DITINGKATKAN	29
389	KOTA BATAM	BAIK	64
390	KOTA TANJUNG PINANG	BAIK	18
391	KAB. LINGGA	PERLU DITINGKATKAN	7
392	KAB. BINTAN	BAIK	15
393	KAB. FAK FAK	PERLU DITINGKATKAN	7
394	KAB. MANOKWARI	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	9

NO.	DAERAH	KATEGORI	JUMLAH KELURAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
395	KAB. SORONG	PERLU DITINGKATKAN	26
396	KOTA SORONG	PERLU DITINGKATKAN	41
397	KAB. RAJA AMPAT	PERLU DITINGKATKAN	4
398	KAB. SORONG SELATAN	PERLU DITINGKATKAN	2
399	KAB. TELUK BINTUNI	PERLU DITINGKATKAN	2
400	KAB. TELUK WONDAMA	SANGAT PERLU DITINGKATKAN	1
401	KAB. KAIMANA	PERLU DITINGKATKAN	2
402	KAB. MAYBRAT	PERLU DITINGKATKAN	1
403	KAB. MAJENE	PERLU DITINGKATKAN	20
404	KAB. MAMUJU	PERLU DITINGKATKAN	13
405	KAB. POLEWALI MANDAR	PERLU DITINGKATKAN	23
406	KAB. MAMASA	PERLU DITINGKATKAN	13
407	KAB. PASANGKAYU	PERLU DITINGKATKAN	4
408	KAB. BULUNGAN	PERLU DITINGKATKAN	7
409	KAB. NUNUKAN	PERLU DITINGKATKAN	8
410	KOTA TARAkan	PERLU DITINGKATKAN	20
	JUMLAH		8,212

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN

KOP KEPALA DAERAH

SURAT PERNYATAAN
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Wali Kota*)..... menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota*)..... telah mengalokasikan anggaran untuk pendanaan kelurahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan/atau Peraturan Kepala Daerah mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.....(*... dengan huruf*), yang berasal dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp.....(*... dengan huruf*); dan
2. Dana Alokasi Umum tambahan sebesar Rp.....(*... dengan huruf*).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan sebagai syarat penyaluran DAU tambahan tahap I Tahun Anggaran 2019.

...(tempat), ...(tanggal)

Bupati/Wali Kota*)

materai Rp6.000

(tanda tangan asli dan stempel basah)

.....(nama)

*) Coret yang tidak perlu

C. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN TAHAP I

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
SAMPAI DENGAN TAHAP I TAHUN ANGGARAN
KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	%	(Rp)	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)=(8)/(5)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
I	KECAMATAN ...												
1	KELURAHAN ...												
	A. Program Pembangunan												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. Dst.....												
	B. Program Pemberdayaan												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. Dst.....												
2	KELURAHAN ...												
	A. Program Pembangunan												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. Dst.....												
	B. Program Pemberdayaan												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. Dst.....												
	Jumlah Total												

.....
Disetujui oleh,
KEPALA DINAS/BADAN.....
.....

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan nomor urut Kelurahan
2	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan pelaksanaan kegiatan yang didanai menggunakan DAU tambahan
3	Kolom 3 diisi dengan volume <i>output</i> , misal: 500
4	Kolom 4 diisi dengan satuan <i>output</i> , misal: meter
5	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7	Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa
10	Kolom 10 diisi dengan persentase capaian <i>output</i> dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto; b. Kegiatan non fisik dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%
11	Kolom 11, 12, dan 13 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan
12	Kolom 14 diisi dengan keterangan, misal: berapa <i>output</i> yang telah terlaksana (kuantitas)

D. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019
KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	%	(Rp)	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)=(8)/(5)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
I	KECAMATAN ...												
1	KELURAHAN ...												
	A. Program Pembangunan												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. Dst.....												
	B. Program Pemberdayaan												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. Dst.....												
2	KELURAHAN ...												
	A. Program Pembangunan												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. Dst.....												
	B. Program Pemberdayaan												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. Dst.....												
	Jumlah Total												

.....
Disetujui oleh,
KEPALA DINAS/BADAN.....

.....

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan nomor urut Kelurahan
2	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan pelaksanaan kegiatan yang didanai menggunakan DAU tambahan
3	Kolom 3 diisi dengan volume <i>output</i> , misal: 500
4	Kolom 4 diisi dengan satuan <i>output</i> , misal: meter
5	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7	Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa
10	Kolom 10 diisi dengan persentase capaian <i>output</i> dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto; b. Kegiatan non fisik dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%
11	Kolom 11, 12, dan 13 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan
12	Kolom 14 diisi dengan keterangan, misal: berapa <i>output</i> yang telah terlaksana (kuantitas)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

